



RINGKASAN

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

RLPPD

1. CAPAIAN KINERJA MAKRO

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Capaian kinerja makro di Kabupaten Banjar sebagai berikut:

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA MAKRO KABUPATEN BANJAR TAHUN 2024 DAN 2025

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025	Perubahan %
1	Indeks Pembangunan Manusia	74,41	75,11	0,94
2	Persentase Penduduk Miskin	2,36	2,74	16,10
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,71	2,76	1,85
4	Pertumbuhan Ekonomi	4,75	5,07	6,74
5	PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	Rp. 40.027.000**	Rp. 41.993.000**	4,91
6	Ketimpangan Pendapatan (<i>Gini Ratio</i>)	0,258	0,281	8,91

Sumber : Data diolah Bappedalitbang Kab.Banjar

2. RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR

Capaian kinerja urusan pemerintahan wajib berkaitan pelayanan dasar merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan wajib berkaitan pelayanan dasar, termasuk di antaranya:

1) Urusan Pendidikan

A. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Urusan Pendidikan yang diperoleh oleh Kabupaten Banjar pada tahun 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025
1	Pendidikan Anak Usia Dini	81,64%	82,52%
2	Pendidikan Dasar	84,72%	93,54%
3	Pendidikan Kesetaraan	87,45%	61,67%

B. Realisasi Belanja Urusan Pendidikan

Realisasi belanja Urusan Pendidikan di Kabupaten Banjar Tahun 2025 sebesar Rp. 173.466.334.710 dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut:

No	Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	33.155.009.736	31.048.833.861	93,65
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.035.816.500	1.029.625.000	99,40
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	480.000.000	480.000.000	100,00
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	6.594.603.000	6.194.541.931	93,93

No	Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	64.800.000	55.632.370	85,85
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	2.095.942.900	1.578.216.000	75,30
		Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	1.492.405.000	1.211.000.000	81,14
		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	107.775.000	106.505.166	98,82
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	227.353.000	209.240.470	92,03
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	227.353.000	227.353.000	100,00
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	2.121.857.520	1.974.027.000	93,03
		Pengadaan Mebel PAUD	325.371.000	321.786.405	98,90
		Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	2.093.127.000	2.036.019.545	97,27
		Penyediaan infrastruktur TIK	1.403.000.000	971.139.000	69,22
		Pengadaan Perlengkapan PAUD	594.195.000	188.806.330	31,78
		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	757.168.500	652.304.032	86,15
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	524.392.116	521.755.000	99,50
		Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	11.153.000	11.153.000	100,00
		Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	344.048.000	331.218.000	96,27
		Pengembangan Konten Digital untuk Pendidikan	35.640.000	34.570.000	97,00
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	3.832.568.000	3.816.044.855,00	99,57
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	106.573.000	98.684.194	92,60
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	437.383.200	411.689.973	94,13
		Pengelolaan Dana BOP PAUD	8.836.680.000	8.587.522.590	97,18
2	Pendidikan Dasar		135.118.910.611	122.691.527.538	90,80
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	97.615.144.034	87.726.580.464	89,87
		Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	1.358.950.000	860.427.330	63,32
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	213.958.000	193.965.963	90,66
		Pengadaan Perlengkapan Sekolah	15.497.753.125	10.204.389.801	65,84
		Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	414.530.000	413.650.000	99,79
		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	951.560.000	848.613.250	89,18
		Pengadaan Mebel Sekolah	417.735.000	416.368.183	99,67
		Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	161.925.000	161.375.000	99,66
		Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	305.980.000	304.950.000	99,66
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	471.550.000	468.951.350	99,45
		Pembangunan Perpustakaan Sekolah	1.276.471.667	1.161.633.000	91,00
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	2.257.830.000	2.140.308.200	94,79
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	913.775.000	909.570.000	99,54
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	3.999.000.000	3.784.500.000	94,64
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	7.556.000	7.496.349	99,21
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	18.599.256.875	17.780.632.996	95,60
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga	1.295.800.000	468.398.364	36,15

No	Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
		Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar			
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1.432.498.000	833.913.923	58,21
		Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	56.684.500	55.796.831	98,43
		Pengembangan konten digital untuk pendidikan	17.880.000	17.739.345	99,21
		Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	169.758.300	163.158.048	96,11
		Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	812.420.400	786.866.079,00	96,85
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	952.536.000	726.193.741	76,24
		Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	42.275.000	41.902.213	99,12
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.643.044.900	2.628.729.000	99,46
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Dasar	191.809.400	135.888.413	70,85
		Pemberian Layanan Pendampingan bagi Satuan Pendidikan untuk Pencegahan Perundungan, Kekerasan dan Intoleransi	181.993.000	178.749.890	98,22
		Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	220.944.000	209.812.366	94,96
		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	27.270.000	26.349.317	96,62
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	1.835.375.000,00	1.794.059.364	97,75
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	40.887.024.867	40.002.192.148	97,84
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	37.503.766.577	34.964.947.074	93,23
		Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	13.210.800	3.916.454	29,65
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	4.702.483.667	4.661.091.000	99,12
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	375.000.000	349.500.000,00	93,20
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	77.617.500	76.681.202,00	98,79
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	604.946.000	588.640.000	97,30
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	89.925.500	89.475.500	99,50
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	273.000.000	272.485.000	99,81
		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	599.286.000	509.257.000	84,98
		Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	198.122.000	197.871.000	99,87
		Pembangunan Perpustakaan Sekolah	428.875.000	425.711.000	99,26
		Pembangunan Laboratorium	325.449.000	271.884.000	83,54
		Pembangunan Fasilitas Parkir	896.386.667	866.395.000	96,65
		Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	336.350.000	310.880.000	92,43
		Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	239.825.500	199.933.000	83,37
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.137.455.000	1.133.412.000	99,64
		Pengadaan Mebel Sekolah	516.245.000	512.425.035	99,26
		Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	149.859.000	147.195.053	98,22
		Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga	539.488.333	530.602.000	98,35

No	Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
		Sekolah			
		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	348.925.000	347.283.045	99,53
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	147.113.400	96.231.900	65,41
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.261.488.000	1.248.155.230	98,94
		Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	34.505.000	34.505.000	100,00
		Pengembangan konten digital untuk pendidikan	34.277.200	34.277.111	100,00
		Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	23.412.600	23.240.513	99,26
		Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	459.279.000	456.509.941	99,40
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	774.056.100	764.663.456,00	98,79
		Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	37.548.000	37.547.503	100,00
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	711.260.000	707.300.000	99,44
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	4.916.909.000	2.863.926.085	58,25
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Pertama	281.276.000	274.107.436	97,45
		Pemberian Layanan Pendampingan bagi Satuan Pendidikan untuk Pencegahan Perundungan, Kekerasan dan Intoleransi	30.820.500	30.020.435	97,40
		Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	45.499.000	45.338.981	99,65
		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	36.599.000	36.318.575	99,23
		Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	977.475.000	943.332.648	96,51
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	15.879.798.810	15.874.834.971	99,97
3	Pendidikan Kesetaraan	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	20.028.254.014	19.725.973.311	98,49
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	21.900.000	20.960.000	95,71
		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	97.300.000	97.161.635	99,86
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	937.776.146	837.594.000	89,32
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3.600.000	3.600.000	100,00
		Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	84.119.500	71.769.500	85,32
		Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	29.140.000	26.071.995	89,47
		Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	4.872.661.000	4.856.442.893	99,67
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	401.350.000	400.190.429	99,71
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	49.997.000	49.850.372	99,71
		Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	42.750.000	39.150.000	91,58
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana,	577.528.468	573.536.000	99,31

No	Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
		Prasarana dan Utilitas Sekolah			
		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	485.951.400	356.778.234	73,42
		Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	26.750.500	26.590.500	99,40
		Pengadaan Mebel Sekolah	800.800.000	800.097.324	99,91
		Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	401.350.000	400.190.429	99,71
		Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	11.195.280.000	11.165.990.000	99,74

Sumber : Dinas Pendidikan, Kab.Banjarnegara

C. Permasalahan yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk Urusan Pendidikan di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- Pada dapodik tidak dapat melakukan filterisasi peserta didik pada Kecamatan.
- Pada Input penerapan SPM Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Berbeda dengan SKPD, sehingga tidak dapat mengisi data pada input penerapan SPM.
- Pada input penerapan SPM data sub kegiatan berbeda dengan anggaran yang ada pada SKPD.

2) Urusan Kesehatan

A. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Urusan Kesehatan yang diperoleh oleh Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025
1	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89,29%	84,30%
2	Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	92,72%	95,83%
3	Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	94,97%	96,78%
4	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	68,75%	68,63%
5	Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	94,62%	70,70%
6	Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	76,00%	67,78%
7	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	81,11%	60,14%
8	Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	91,63%	93,93%
9	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	98,13%	97,80%
10	Persentase pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa berat sesuai standar	98,39%	93,80%

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025
11	Persentase pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis sesuai standar	98,72%	97,98%
12	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar	97,76%	97,40%

B. Realisasi Belanja Urusan Kesehatan

Realisasi belanja Urusan Kesehatan di Kabupaten Banjar Tahun 2025 sebesar Rp. 16.946.528.632 dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut:

No	Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	2.789.821.800	2.373.177.400	85,06
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	231.688.400	138.940.000	59,97
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	215.667.800	64.671.150	29,14
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	158.739.280	153.244.000	96,53
5.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	1.947.167.100	1.563.391.100	80,29
6.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	100.430.500	99.021.871	98,59
7.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	131.471.600	119.535.000	90,92
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	38.014.500	37.564.500	98,81
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	63.148.000	61.930.000	98,07
10.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	355.851.000	310.103.500	87,14
11.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	547.318.000	430.439.200	78,64
12.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	688.454.000	682.234.900	99,09
13.	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	4.432.054.800	2.954.674.231	66,66
14.	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	11.762.018.515	5.454.776.040	46,38
15.	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	3.278.800.000	3.185.060.640	97,14

Sumber : Dinas Kesehatan, Kab.Banjar

C. Permasalahan yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk Urusan Kesehatan di Kabupaten Banjar Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

No	Indikator	Permasalahan	Solusi	Tindaklanjut
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1. Ibu hamil yang datang ke petugas kesehatan lebih dari 3 bulan usia kehamilan, 2. Banyak ibu hamil yang belum mengkonsumsi tablet tambah darah dengan rutin, 3. Masih ada ibu hamil yang belum 6 kali kunjungan ke petugas kesehatan (termasuk dengan dokter), 4. Masih ada ibu hamil yang tidak periksa laboratorium	1. Bekerjasama dengan TPK untuk mengaktifkan pendampingan calon pengantin dalam dalam elsimil (elektronik hamil) 2. Mengaktifkan aplikasi Kesehatan calon pengantin 3. Meningkatkan peran petugas Kesehatan dalam edukasi pentingnya pemeriksaan kehamilan	Berkoordinasi dengan Dinsos P3AP2 KB untuk mendorong TPK lebih proaktif dalam melakukan pendampingan kepada calon pengantin Melakukan bimbingan kepada pengelola usia produktif untuk penggunaan aplikasi Kesehatan calon pengantin Melaksanakan desk program Kesehatan keluarga dan gizi dalam penguatan peran petugas Kesehatan untuk memberikan edukasi pentingnya pemeriksaan kehamilan
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1. Masih ada persalinan yang belum di faskes, 2. Masih ada persalinan yang ditolong oleh Dukun Kampung, 3. Faktor budaya masih kental di Masyarakat yaitu melahirkan di rumah karena adanya kepercayaan dan lebih nyaman di rumah untuk melahirkan tidak mau dibawa ke fasilitas kesehatan walaupun sudah dilengkapi peralatannya	1. Stiker P4K diaktifkan dan ditindak lanjut sampai kepengambil keputusan akhir. 2. Kelas ibu hamil untuk menjangir ibu hamil agar persalinan dapat dilakukan dengan petugas kesehatan difasilitas kesehatan yang tersedia di desa.	Melaksanakan supervisi fasilitatif layanan KIA sekaligus monitoring stiker P4K ke Puskesmas dan mendorong Puskesmas untuk berkoordinasi dengan lintas sektor, tokoh agama dan tokoh Masyarakat agar persalinan dilaksanakan di fasilitas kesehatan
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	1. Buku KIA masih belum dimanfaatkan secara optimal, 2. Formulir MTBM belum dipakai, Kunjungan KN3 belum maksimal karena masih banyak kematian neonatal, 3. Pelayanan kesehatan ibu hamil yang tidak maksimal akan menyebabkan ibu melahirkan dengan bayi berisiko, terjadi komplikasi yang menyebabkan kematian pada bayi baru lahir sebelum umur bayi 28 hari	1. Peningkatan kapasitas bidan dalam pelayanan neonatal esensial untuk bidan yang belum terorientasi neonatal esensial 2. Melakukan kroscek penggunaan formulir MTBM. 3. Bimbingan teknis ke puskesmas.	Melakukan pertemuan peningkatan kapasitas bidan dalam pelayanan neonatal esensial bagi bidan desa yang mengikuti orientasi pelayanan Kesehatan neonatal esensial Melakukan bimbingan teknis ke Puskesmas untuk monitoring penggunaan formulir MTBM
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	1. Petugas belum memahami Definisi Operasional, 2. Formulir KPSP tidak digunakan secara maksimal, 3. Tingkat kehadiran balita ke Posyandu masih rendah, 4. Cakupan imunisasi masih rendah, Kurangnya kesadaran masyarakat terutama orang tua yang mempunyai bayi / balita untuk mendatangi tenaga kesehatan ataupun kefasilitas kesehatan tingkat desa untuk memantau kesehatan pertumbuhan dan perkembangan anak mereka	1. Sinkronisasi data antara kesehatan program kesehatan keluarga, gizi dan imunisasi 2. Melaksanakan orientasi pemantauan pertumbuhan dan perkembangan bagi kader. 3. Meningkatkan promosi Kesehatan terkait pentingnya pemantauan pertumbuhan dan perkembangan 4. Melaksanakan Desk evaluasi hasil kinerja dan penyamaan persepsi. 5. Bimbingan teknis ke puskesmas,	Melaksanakan desk program kesga dan gizi bagi pengelola gizi pengelola anak dan pengelola imunisasi Mendata kader yang belum terorientasi antropometri Melaksanakan orientasi antropometri bagi kader posyandu berdasarkan hasil pendataan Mendorong Puskesmas untuk lebih aktif dalam melaksanakan promosi dan edukasi terkait pentingnya pemantauan pertumbuhan dan perkembangan
5.	Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar	1. Belum tersedianya buku rapor kesehatan untuk semua sasaran, Cakupan TTD pada anak rematri usia pendidikan dasar masih rendah, 2. Kurangnya koordinasi lintas program dan lintas sektor untuk pelayanan anak usia pendidikan dasa	1. Melakukan penjangiran anak usia Pendidikan dasar pada posyandu remaja dan pondok pesantren atau diniyah. 2. Menghimbau untuk mengaktifkan posyandu remaja di desa. 3. Koordinasi antara pengelola usia Pendidikan dasar dan pengelola CKG puskesmas 4. Melakukan evaluasi melalui bimtek baik secara daring maupun luring	Mendorong Puskesmas untuk melaksanakan penjangiran anak usia Pendidikan dasar di posyandu remaja dan sekolah keagamaan/ponpes/diniyah Membuat surat edaran ke Puskesmas untuk mengaktifkan posyandu remaja /kunjungan remaja
6.	Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Kendala sistem filter data individu di ASIK sehingga menghambat dalam input data skrining penyakit tidak menular Usia Produktif	<ul style="list-style-type: none"> ● Memaksimalkan pendampingan penggunaan ASIK bagi kader. ● Memaksimalkan perencanaan kegiatan di Tahun 2026 untuk pencapaian target kinerja 	<ul style="list-style-type: none"> ● Melaksanakan kegiatan skrining penyakit tidak menular terhadap usia produktif di Posbindu PTM rutin maupun mobile, Posyandu Siklus Hidup serta Pandu PTM di Puskesmas. Melaksanakan kegiatan lomba posbindu PTM dan DePe Cantix serta Pandu PTM di Puskesmas untuk upaya peningkatan pelaksanaan skrining ptm Prioritas
7.	Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	1. Pemeriksaan factor risiko usia lanjut masih gabung di Posbindu, 2. Belum cukup ketersediaan strip uji gula darah dan kolesterol,	1. Membentuk posyandu lansia baru bila memungkinkan atau posyandu lansia yang ada berpindah-pindah per RT sehingga bisa menjangkau semua lansia.	Berkoordinasi dengan Puskesmas agar membentuk posyandu lansia baru bila memungkinkan, apabila tidak memungkinkan dengan melaksanakan posyandu lansia mobile

No	Indikator	Permasalahan	Solusi	Tindaklanjut
		3. Banyak Lansia yang belum datang ke Posyandu, 4. Belum banyak tersedia strip kolesterol, 5. Kurangnya kesadaran lansia untuk memeriksakan kesehatannya, dimana lansia menganggap dirinya sehat	2. Sweeping kunjungan lansia 3. Mengusulkan stik pemeriksaan gula darah dan kolesterol untuk lansia, 4. Membuat penjadwalan supervisi program lansia,	Koordinasi dengan seksi farmalkes untuk mengusulkan stik pemeriksaan gula darah dan kolesterol Melaksanakan bimbingan teknis program lansia ke Puskesmas
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	1. Masih rendahnya literasi kesehatan, stigma terhadap penyakit kronis terutama Hipertensi, dan ketidakpatuhan terhadap pengobatan rutin	1. Memaksimalkan peran serta jaringan puskesmas untuk pemantauan penderita hipertensi yang sudah terdata.	• Mengadakan Komitmen kepala puskesmas dan Standar Operasional Prosedur (SOP) terhadap capaian SPM pelayanan kesehatan penderita Hipertensi Melaksanakan e-monev validasi SPM sehingga laporan capaian dapat terkontrol
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	1. Masih ada petugas pengelola yang tidak tertib laporan register manual penderita Diabetes Mellitus	Memaksimalkan perencanaan kegiatan di Tahun 2026 untuk pencapaian target kinerja	Melaksanakan e-monev validasi SPM sehingga laporan capaian dapat terkontrol
10.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Masih kurang maksimalnya input data ke aplikasi Simkeswa sehingga terdapat perbedaan data	Memaksimalkan perencanaan kegiatan di Tahun 2026 untuk pencapaian target kinerja	Melaksanakan e-monev validasi SPM sehingga laporan capaian dapat terkontrol
11.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Terduga TBC (suspek) atau kontak erat sulit ditemui pada jam kerja saat petugas kunjungan rumah	Meningkatkan sosialisasi di masyarakat dan koordinasi lintas sektor Meningkatkan sdm puskesmas untuk capaian program dalam kunjungan rumah	Melaksanakan monitoring dan evaluasi program TB dan melaksanakan kegiatan program TB
12.	Pelayanan Kesehatan Orang yang Berisiko Terinfeksi HIV	Tingkat pendidikan masyarakat yang rendah di beberapa daerah dapat menjadi hambatan dalam penyerapan dan pemahaman informasi mengenai sosialisasi	Meningkatkan sosialisasi di masyarakat dan koordinasi lintas sektor Meningkatkan sdm puskesmas untuk capaian program dalam kunjungan rumah	Melaksanakan kegiatan konselor HIV AIDS Melaksanakan VCT Mobile Melaksanakan kegiatan Program HIV

Sumber : Dinas Kesehatan, Kab.Banjara

3) Urusan Pekerjaan Umum

A. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Urusan Pekerjaan Umum yang diperoleh oleh Kabupaten Banjar pada tahun 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	100%
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	100%	100%

B. Realisasi Belanja Urusan Pekerjaan Umum

Realisasi belanja Urusan Pekerjaan Umum di Kabupaten Banjar Tahun 2025 sebesar Rp. 29,887,705,704 dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut:

No	Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum SPAM di Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0.00%
		Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	7,477,246,700	7,143,270,100	95.53%
		Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	415,826,400	376,463,500	90.53%

		Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	2,003,600,000	2,003,600,000	100.00%
		Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	10,170,104,100	8,916,976,214	87.68%
2	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik (SPALD) dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	406,950,000	390,604,500	95.98%
		Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	11,446,011,159	10,479,227,390	91.55%
		Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	611,562,000	577,564,000	94.44%

Sumber : DPUPRP Kab.Banjara

C. Permasalahan yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk Urusan Pekerjaan Umum di Kabupaten Banjar Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

No	Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut
1	Terdapat beberapa permasalahan pada saat pelaksanaan berlangsung seperti permasalahan listrik, daftar penerima manfaat / BNBA yang berubah, perubahan jalur pipa distribusi dari hasil perencanaan	Membuat surat pernyataan yang berisi tentang alasan pemindahan / perubahan BNBA / daftar penerima manfaat dan di tandatangani oleh aparat desa dan penerima manfaat semula. Melakukan pemeriksaan lapangan terkait pemindahan jalur pipa distribusi	SKPD dan Konsultan perencana melakukan koordinasi dengan aparat desa terkait daftar penerima manfaat, kesediaan lahan, jalur perpipaan dan mobilisasi dilapangan sehingga tidak menghambat jalannya pekerjaan.
2	Penerbitan SK Bansos yang memerlukan waktu yang relatif lama pada bagian Hukum Setda menyebabkan keterlambatan dalam penandatanganan PKS	Melakukan Monitoring dan Evaluasi pekerjaan bersama Tenaga Fasilitator Lapangan mengingat waktu pekerjaan yang mendekati batas akhir disebabkan keterlambatan PKS	Percepatan penentuan lokasi prioritas Bansos, survey kelapanga dan perhitungan RAB serta proses SK Lokasi
3	Data terkait DPM untuk air limbah masih terkendala karena pencocokan data ulang dengan data Keluarga Beresiko Stunting (KRS) dan data di lapangan	Melakukan survei untuk data KRS dan DPM di lapangan	Telah dilakukan survei untuk data KRS dan DPM di lapangan oleh Tenaga Fasilitator Lapangan.
4	Perbedaan standar layak dan aman di OPD lain membuat perhitungan menjadi lebih sulit, serta penyesuaian beberapa program sekaligus	Penyamaan persepsi dengan merujuk SPM PU	Melakukan rapat koordinasi dan pemindaian data layak dan aman sesuai dengan SPM PU
5	Perencanaan akses sanitasi diperlukan anggaran yang sangat besar mengingat pembangunan yang sudah berjalan wajib menyesuaikan SNI dan Peraturan yang berlaku untuk Pemeliharaan dan Operasional, perencanaan diarahkan kepada pemeliharaan, dana yang digunakan tidak mencapai 100% karena dari hasil perencanaan, kebutuhan untuk pemeliharaan diperlukan lebih kecil dibandingkan pagu yang tersedia	Mencari sumber pendanaan bantuan pembangunan Tangki Septik Individual (TSI) ke pemerintah provinsi dan pusat	Mengajukan usulan pembangunan Tangki Septik Individual (TSI) ke pemerintah provinsi dan pusat
6	Pelaksanaan sudah sesuai dengan ketentuan teknis, kendala paling sering terjadi yaitu ada perubahan nama penerima	Melakukan komitmen antara Daftar Penerima Manfaat (DPM) dengan pelaksana untuk meminimalisir perubahan data BNBA.	Pembuatan surat komitmen antara Daftar Penerima Manfaat (DPM) dengan Pelaksana.

Sumber : DPUPRP Kab.Banjara

4) Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

A. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang diperoleh oleh Kabupaten Banjar pada tahun 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025
1	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	100%	100%
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%

B. Realisasi Belanja Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Realisasi belanja Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Banjar Tahun 2025 sebesar Rp. 374.446.200 dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut:

No	Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	0	0	
		Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	188.466.000	187.223.100	99.34
		Sub Kegiatan Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	93.178.500	92.719.600	99.51
		Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	95.287.500	94.503.500	99.18

Sumber : DPRKPLH Kab.Banjar

C. Permasalahan yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Banjar Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

No	Permasalahan	Solusi	Tindaklanjut
1.	Kendala administrasi berupa belum diterbitkannya Surat Keputusan (SK) penetapan status bencana oleh Kepala Daerah, sehingga pemerintah daerah tidak memiliki legitimasi untuk mengalokasikan anggaran dan sumber daya penanganan bencana.	Penguatan koordinasi lintas perangkat daerah untuk percepatan penetapan status bencana sebagai dasar hukum pelaksanaan SPM	Mendorong percepatan penerbitan SK penetapan status bencana oleh Kepala Daerah pada saat terjadi bencana.
2.	Belum tersedianya petunjuk teknis yang rinci dari pemerintah pusat terkait implementasi SPM penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana. Meskipun Permen PUPR Nomor 13 Tahun 2023 telah menjadi dasar hukum, regulasi tersebut masih bersifat umum sehingga pemerintah daerah harus menafsirkan	Penyusunan panduan teknis yang lebih rinci dan komprehensif dari pemerintah pusat serta penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam penerapan SPM.	Mengusulkan kepada pemerintah pusat penyusunan petunjuk teknis SPM secara lebih operasional serta menyusun pedoman teknis internal daerah sebagai acuan sementara pelaksanaan SPM.

No	Permasalahan	Solusi	Tindakanjnt
	dan menyusun mekanisme pelaksanaan secara mandiri.		
3.	Keterbatasan anggaran daerah serta sifat bencana yang tidak dapat diprediksi menyebabkan pembiayaan SPM sering kali tidak mencukupi, terutama pada saat terjadi bencana berskala besar. Hal ini berdampak pada keterbatasan cakupan penerima bantuan dan penundaan penanganan bagi sebagian korban.	Mengalokasikan anggaran SPM secara bertahap sesuai prioritas serta melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk memperoleh dukungan pendanaan tambahan pascabencana.	Mengalokasikan anggaran SPM secara bertahap sesuai prioritas serta melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk memperoleh dukungan pendanaan tambahan pascabencana.
4.	Kesulitan dalam penetapan target kinerja SPM akibat keterbatasan anggaran dan kebijakan prioritas penerima bantuan, yang saat ini lebih difokuskan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), meskipun secara regulasi seluruh warga terdampak berhak menerima layanan.	Melakukan penyesuaian target SPM dengan menyusun skala prioritas penerima bantuan berdasarkan tingkat kerusakan dan kerentanan masyarakat.	Melakukan penyesuaian target SPM dengan menyusun skala prioritas penerima bantuan berdasarkan tingkat kerusakan dan kerentanan masyarakat.
5.	Terbatasnya kapasitas sumber daya manusia pelaksana SPM dalam memahami regulasi, administrasi, dan mekanisme pelaksanaan SPM penanganan bencana.	Peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan, sosialisasi, dan pendampingan teknis penerapan SPM.	Mengikuti bimbingan teknis dan pelatihan bagi personil penerapan SPM
6.	Proses pendataan dan identifikasi korban bencana dan kerusakan rumah belum optimal akibat keterbatasan anggaran pendataan, luasnya wilayah terdampak, kondisi medan pascabencana yang sulit dijangkau, serta keterbatasan jumlah dan kapasitas personel pendata.	Penguatan sistem pendataan melalui optimalisasi perencanaan anggaran pendataan, pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan koordinasi lintas sektor dan pelibatan aparat wilayah setempat.	Mengalokasikan anggaran khusus pendataan, melibatkan perangkat daerah terkait, aparat kecamatan/kelurahan dan masyarakat, serta memanfaatkan sistem pendataan berbasis digital untuk mempercepat dan meningkatkan akurasi data.

Sumber : DPRKPLH Kab.Banjara

5) Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum

A. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang diperoleh oleh Kabupaten Banjar pada tahun 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025
1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	97,78%	91,46%
2	Pelayanan informasi rawan bencana	100%	100%
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	99,90%	100%

B. Realisasi Belanja Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Realisasi belanja Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Banjar Tahun 2025 sebesar Rp. 18.492.875.780 dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut:

No	Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3,776,164,100	2,772,582,000	73.42

No	Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Kabupaten / Kota				
		Sub Kegiatan Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum	1,283,535,300	891,242,000	69.44
		Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	292,437,800	166,223,000	56.84
		Sub Kegiatan Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan	591,926,000	433,940,000	73.31
		Sub Kegiatan Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	618,154,000	310,934,000	50.30
		Sub Kegiatan Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah	9,400,000	-	-
		Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	980,711,000	970,243,000	98.93
		Kegiatan Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	689,189,000	528,011,000	76.61
		Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	397,564,000	369,995,000	93.07
		Sub Kegiatan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	258,713,000	129,048,000	49.88
		Sub Kegiatan Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	32,912,000	28,968,000	88.02

Sumber : Satpol PP Kab.Banjor

No	Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		763,535,000	684,785,295	89.69%
		Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	556,975,000	490,923,750	88.14%
		Sub.Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	556,975,000	490,923,750	88.14%
		Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	206,560,000	193,861,545	93.85%
		Sub.Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	67,122,000	63,533,580	94.65%
		Sub.Kegiatan Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten / Kota	40,406,000	37,844,755	93.66%
		Sub.Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	33,712,000	32,617,175	96.75%
		Sub.Kegiatan Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	65,320,000	59,866,035	91.65%
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		2,195,905,350	1,944,226,583	88.54%
		Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			
		Sub.Kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	1,558,482,850	1,370,128,198	87.91%
		Sub.Kegiatan Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana	72,314,000	59,297,600	82.00%
		Sub Kegiatan Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	49,111,000	45,160,000	91.95%
		Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan	324,513,000	296,895,202	91.49%

No	Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
		untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan			
		Sub. Kegiatan Penyusunan Rencana Kontijensi	126,680,000	116,534,038	91.99%
		Sub. Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	64,804,500	56,211,545	86.74%
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	2,768,498,000	1,766,145,485	63.79%
		Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	119,980,000	104,487,532	87.09%
		Sub. Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	52,015,000	8,168,075	15.70%
		Sub. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam Penanganan Keadaan Darurat Kabupaten/Kota	65,200,000	63,759,200	97.79%
		Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	825,012,500	744,796,228	90.28%
		Sub. Kegiatan Aktivasi Komando Penanganan Darurat Bencana	1,706,290,500	844,934,450	49.52%
		Jumlah	5,727,938,350	4,395,157,363	76.73%

Sumber : BPBD Kab.Banjor

No	Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN (DAMKAR)	12.059.524.002	11.325.136.417	93,91%
		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	9.647.607.720	9.267.916.859	96,06%
		Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	361.203.200	315.036.402	87,22%
		Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	533.641.400	311.164.531	58,31%
		Pembinaan aparaturnya pemadam kebakaran	227.427.000	220.846.229	97,11%
		Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	8.319.399.120	8.246.152.717	99,12%
		Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga, dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	13.231.000	13.042.800	98,58%
		Pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga	192.706.000	161.674.180	83,90%
		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	63.379.200	60.750.126	95,85%
		Pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran	34.844.200	34.419.708	98,78%
		Penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran	28.535.000	26.330.418	92,27%
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	385.054.000	355.945.984	92,44%
		Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	282.889.000	268.986.580	95,09%
		Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran	92.091.000	77.011.085	83,62%
		Dukungan pemberdayaan masyarakat/relawan pemadam kebakaran melalui penyediaan sarana dan prasarana	10.074.000	9.948.319	98,75%
		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	1.963.483.082	1.640.523.448	83,55%
		Pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	1.963.483.082	1.640.523.448	83,55%

Sumber : DPKP Kab.Banjor

C. Permasalahan yang Dihadapi

Tidak ada permasalahan dalam penerapan SPM Urusan Trantibumlinmas.

6) Urusan Sosial

A. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Urusan Sosial yang diperoleh oleh Kabupaten Banjar pada tahun 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	100%	100%
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	100%	100%
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	100%	100%
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	96,67%	100%
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana Kabupaten /Kota	100%	83,68%

B. Realisasi Belanja Urusan Sosial

Realisasi belanja Urusan Sosial di Kabupaten Banjar Tahun 2025 sebesar Rp. 1.479.428.960 dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut:

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	Program Rehabilitasi Sosial					
	1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		1.326.359.200	1.218.900.460	91.90
		1	Penyediaan permakanan			
			Penyandang Disabilitas Terlantar (di Luar Panti)	252,478,600	243,913,200	96.23
			Anak Terlantar (di Luar Panti)	21,937,500	20,123,175	91.73
			Lanjut Usia Terlantar (di Luar Panti)	477,176,100	437,699,275	91.87
			Gelandangan Pengemis (di Luar Panti)	12,171,250	10,890,375	91.28
			Total	763,763,450	712,626,025	93.30
		2	Penyediaan sandang			
			Penyandang Disabilitas Terlantar (di Luar Panti)	29,188,500	27,775,000	95.16
			Anak Terlantar (di Luar Panti)	29,188,500	27,775,000	95.16
			Lanjut Usia Terlantar (di Luar Panti)	86,077,000	82,800,000	96.19
			Gelandangan Pengemis (di Luar Panti)	0	-	-
			Total	144,454,000	138,350,000	95.77
		3	Penyediaan alat bantu			
			Penyandang Disabilitas Terlantar (di Luar Panti)	100,900,000	99,595,000	98.71
			Anak Terlantar (di Luar Panti)	0	-	-
			Lanjut Usia Terlantar (di Luar Panti)	100,900,000	99,595,000	98.71
			Gelandangan Pengemis (di Luar Panti)	0	-	-
			Total	201,800,000	199,190,000	98.71
		4	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga			
			Penyandang Disabilitas Terlantar (di Luar Panti)	634,000	0	0
			Anak Terlantar (di Luar Panti)	8,633,000	5,200,000	60.23
			Lanjut Usia Terlantar (di Luar Panti)	22,633,000	15,400,000	68.04
			Gelandangan Pengemis (di Luar Panti)	0	0	0
			Total	31,900,000	20,600,000	64.58

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
		5	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial			
			Penyandang Disabilitas Terlantar (di Luar Panti)	11,561,000	11,310,000	97.83
			Anak Terlantar (di Luar Panti)	15,889,500	15,342,985	96.56
			Lanjut Usia Terlantar (di Luar Panti)	0	0	0
			Gelandangan Pengemis (di Luar Panti)	56,071,000	55,037,950	98.16
			Total	83,521,500	81,690,935	97.81
		6	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat			
			Penyandang Disabilitas Terlantar (di Luar Panti)	3,914,160	3,566,670	91.12
			Anak Terlantar (di Luar Panti)	1,957,100	1,783,330	91.12
			Lanjut Usia Terlantar (di Luar Panti)	4,892,700	4,458,330	91.12
			Gelandangan Pengemis (di Luar Panti)	978,540	891,670	91.12
			Total	11,742,500	10,700,000	91.12
		7	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak			
			Penyandang Disabilitas Terlantar (di Luar Panti)	875,000	250,000	28.57
			Anak Terlantar (di Luar Panti)	680,500	250,000	36.74
			Lanjut Usia Terlantar (di Luar Panti)	1,458,300	250,000	17.14
			Gelandangan Pengemis (di Luar Panti)	486,200	250,000	51.42
			Total	3,500,000	1,000,000	28.57
		8	Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar			
			Penyandang Disabilitas Terlantar (di Luar Panti)	1,167,000	500,000	42.84
			Anak Terlantar (di Luar Panti)	875,000	750,000	85.71
			Lanjut Usia Terlantar (di Luar Panti)	875,000	750,000	85.71
			Gelandangan Pengemis (di Luar Panti)	583,000	500,000	85.76
			Total	3,500,000	2,500,000	71.43
		9	Pemberian layanan data dan pengaduan			
			Penyandang Disabilitas Terlantar (di Luar Panti)	1,749,875	750,000	42.86
			Anak Terlantar (di Luar Panti)	875,000	500,000	57.14
			Lanjut Usia Terlantar (di Luar Panti)	3,499,750	1,750,000	50.00
			Gelandangan Pengemis (di Luar Panti)	874,875	250,000	28.58
			Total	6,999,500	3,250,000	46.43
		10	Pemberian layanan kedaruratan			
			Penyandang Disabilitas Terlantar (di Luar Panti)	12,855,000	11,781,175	91.65
			Anak Terlantar (di Luar Panti)	7,141,343	6,545,125	91.65
			Lanjut Usia Terlantar (di Luar Panti)	15,710,000	14,399,200	91.66
			Gelandangan Pengemis (di Luar Panti)	2,856,907	2,618,000	91.64
			Total	38,563,250	35,343,500	91.65
		11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga			
			Penyandang Disabilitas Terlantar (di Luar Panti)	1,050,000	250,000	23.81
			Anak Terlantar (di Luar Panti)	525,000	250,000	47.62
			Lanjut Usia Terlantar (di Luar Panti)	1,575,000	500,000	31.75
			Gelandangan Pengemis (di Luar Panti)	350,000	250,000	71.43
			Total	3,500,000	1,250,000	35.71
		12	Pemberian layanan rujukan			
			Penyandang Disabilitas Terlantar (di Luar Panti)	1,488,000	0	0
			Anak Terlantar (di Luar Panti)	30,675,000	12,400,000	40.42
			Lanjut Usia Terlantar (di Luar Panti)	476,000	0	0
			Gelandangan Pengemis (di Luar Panti)	476,000	0	0
			Total	33,115,000	12,400,000	37.45
	2	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		1,410,370,000	260,528,500	18.47
		1	Penyediaan makanan	525,995,000	235,342,500	44.74
		2	Penyediaan sandang	448,656,000	500,000	0.11
		3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	0	0	0
		4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	423,993,500	15,158,000	3.58
		5	Pelayanan dukungan Psikososial	11,725,500	9,528,000	81.26

Sumber : DINSOSP3AP2KB Kab.Banjjar

C. Permasalahan yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk Urusan Sosial di Kabupaten Banjar Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

No	Permasalahan	Solusi	Tindaklanjut
1	Pengumpulan data masih menghadapi kendala berupa lamanya proses integrasi dan pemilahan data, verifikasi dan validasi lapangan yang belum tuntas, keterbatasan akses wilayah, ketidaksinkronan data akibat potensi data ganda, serta keterbatasan informasi dan keterampilan SDM dalam pengelolaan data.	Menetapkan batas waktu yang jelas untuk pengumpulan dan pemilahan data serta menjalin kerja sama dengan petugas data dan para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pengumpulan data, termasuk di wilayah desa terpencil.	penyusunan jadwal pengumpulan dan pemilahan data secara terstruktur, penguatan koordinasi dan kerja sama dengan petugas pendata serta stakeholder terkait hingga tingkat desa, termasuk penugasan khusus untuk wilayah terpencil guna memastikan kelengkapan dan ketepatan data.
2	Penghitungan kebutuhan masih dilakukan secara individual per orang PPKS, diperparah oleh kurangnya pemahaman SDM terhadap SPM serta rendahnya kesadaran akan pentingnya penghitungan kebutuhan, sehingga menimbulkan data ganda/berulang dan berdampak pada ketidaktepatan progres, analisis, serta akurasi data.	Penghitungan kebutuhan dilakukan dengan menetapkan target PPKS sebagai sasaran penerima layanan SPM melalui pemastian data by name by address (BNBA) serta peningkatan pemahaman SPM dengan mencari berbagai sumber informasi atau mengikuti sosialisasi dan bimbingan teknis.	Tindak lanjut yang dilakukan adalah melakukan pemutakhiran dan validasi data PPKS secara berkala berbasis by name by address (BNBA), meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis terkait SPM, serta menyusun mekanisme penghitungan kebutuhan yang terstandar agar data lebih akurat dan konsisten.
3	Perencanaan dan penganggaran SPM belum optimal karena adanya pemberian bantuan di luar anggaran Dinas Sosial yang tidak diketahui besaran anggarannya, penghitungan kebutuhan yang belum berbasis data akurat, serta ketidaktepatan dan ketidakvalidan data yang menghambat proses pengolahan sehingga berdampak pada ketidaktepatan perencanaan dan penyusunan anggaran.	Perencanaan dan penganggaran dilakukan dengan menjalin koordinasi dengan pihak pemilik sumber dana lain yang memberikan bantuan kepada PPKS serta melakukan penyesuaian kegiatan dengan penganggaran layanan SPM agar lebih tepat dan terarah.	Tindak lanjut yang dilakukan adalah memperkuat koordinasi dan pendataan bantuan dari seluruh sumber pendanaan bagi PPKS, melakukan sinkronisasi data kebutuhan dengan perencanaan kegiatan, serta menyusun penganggaran layanan SPM secara lebih terintegrasi dan berbasis data yang valid.
4	Pelaksanaan layanan SPM kepada PPKS belum optimal karena masih dilakukan secara perorangan, menghadapi kendala aksesibilitas di wilayah pedesaan dan pesisir, serta dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman SDM terhadap pengumpulan data, penghitungan kebutuhan, perencanaan, dan penganggaran sehingga layanan menjadi tidak tepat sasaran dan tujuan serta masih memerlukan peningkatan kapasitas melalui pembelajaran, diskusi, dan konsultasi.	Pelaksanaan dilakukan dengan memperkuat pemahaman terhadap maksud dan tujuan pemberian layanan SPM bagi PPKS serta melakukan koordinasi, konsultasi, dan diskusi dengan pihak pengampu SPM di tingkat daerah maupun pusat.	Tindak lanjut yang dilakukan adalah meningkatkan kapasitas SDM melalui pendalaman pemahaman kebijakan dan pedoman SPM, memperkuat koordinasi dan komunikasi berkelanjutan dengan pihak pengampu SPM di daerah maupun pusat, serta melakukan evaluasi pelaksanaan layanan agar lebih tepat sasaran dan sesuai tujuan.

Sumber : DINSOSP3AP2KB Kab.Banjor

3. HASIL EPPD DAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

1) Hasil EPPD Tahun Sebelumnya

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7 – 2109 Tahun 2025 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2024 Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2023, Kabupaten Banjar berhasil mendapatkan hasil EPPD dengan skor kinerja 3,7047 dan status kinerja Tinggi.

2) Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Sebelumnya

Berdasarkan Laporan Nomor 5.B/LHP/XIX.BJM/05/2025, Kabupaten Banjar berhasil mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2024.

4. RINGKASAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH

Berdasarkan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar *Unaudited* Tahun 2025 pertanggal 15 Januari 2026 realisasi pendapatan Kabupaten Banjar tahun 2025 mencapai sebesar Rp. 3.099.392.962.288,48 dan realisasi belanja daerah Kabupaten Banjar tahun 2025 mencapai Rp. 2.902.763.901.620,69. Secara rinci, rincian realisasi anggaran pendapatan dan belanja pemerintah daerah Kabupaten Banjar tahun 2025 berdasarkan jenis pendapatan dan jenis belanja dapat dilihat dalam tabel berikut:

Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan	Target	Realisasi	Realisasi (%)
Pendapatan Daerah	Rp2.593.834.061.575,00	Rp3.099.419.014.972,29	119,49%
Pendapatan Asli Daerah	Rp331.708.671.959,00	Rp378.195.544.475,29	114,01%
Pajak Daerah	Rp161.734.000.000,00	Rp192.638.435.244,74	119,11%
Retribusi Daerah	Rp133.745.147.512,00	Rp55.395.281.817,10	41,42%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp13.754.419.548,00	Rp14.739.450.551,00	107,16%
Lain-lain PAD yang Sah	Rp22.475.104.899,00	Rp115.422.376.862,45	513,56%
Pendapat Transfer	Rp2.231.688.090.766,00	Rp2.644.529.518.571,00	118,50%
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	Rp1.893.687.680.000,00	Rp2.187.323.323.859,00	115,51%
Dana Bagi Hasil Pajak	Rp50.533.470.000,00	Rp63.344.944.000,00	125,35%
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	Rp672.949.678.000,00	Rp982.890.873.555,00	146,06%
Dana Alokasi Umum	Rp853.339.993.000,00	Rp847.722.089.926,00	99,34%
Dana Alokasi Khusus	Rp316.864.539.000,00	Rp293.365.416.378,00	92,58%
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	Rp230.231.953.000,00	Rp218.735.230.856,00	95,01%
Dana Desa	Rp222.918.228.000,00	Rp211.423.885.856,00	94,84%
Dana Insentif Daerah	Rp7.313.725.000,00	Rp7.311.345.000,00	99,97%
Transfer Pemerintah Provinsi	Rp77.331.158.916,00	Rp238.470.963.856,00	308,38%
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Rp77.331.158.916,00	Rp238.470.963.856,00	308,38%
Bantuan Keuangan	Rp0,00	Rp0,00	0,00%
Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	Rp0,00	Rp0,00	0,00%
Bantuan Keuangan	Rp0,00	Rp0,00	0,00%
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp30.437.298.850,00	Rp76.693.951.926,00	251,97%
Pendapatan Hibah	Rp0,00	Rp0,00	0,00%
Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Rp30.437.298.850,00	Rp76.693.951.926,00	251,97%
Belanja Daerah	Rp3.209.464.177.614,00	Rp2.902.763.901.620,69	90,44%
Belanja Operasi	Rp2.129.793.647.806,00	Rp1.915.800.552.080,66	89,95%
Belanja Pegawai	Rp1.119.349.498.079,00	Rp1.013.978.049.874,00	90,59%
Belanja Barang dan Jasa	Rp901.930.527.387,00	Rp799.344.769.302,12	88,63%
Belanja Hibah	Rp101.591.307.340,00	Rp95.846.700.404,54	94,35%
Belanja Bantuan Sosial	Rp6.922.315.000,00	Rp6.631.032.500,00	95,79%
Belanja Modal	Rp646.006.418.217,00	Rp575.387.610.372,03	89,07%
Belanja Modal Tanah	Rp19.156.440.000,00	Rp4.564.812.830,00	23,83%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp136.553.454.078,00	Rp122.546.543.114,00	89,74%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp168.160.432.482,00	Rp154.497.244.578,83	91,87%
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp314.318.328.557,00	Rp286.679.786.117,20	91,21%
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp5.446.073.100,00	Rp5.053.352.667,00	92,79%
Belanja Modal Aset Lainnya	Rp2.371.690.000,00	Rp2.045.871.065,00	86,26%
Belanja Tidak Terduga	Rp10.000.000.000,00	Rp5.121.658.105,00	51,22%
Belanja Tidak Terduga	Rp10.000.000.000,00	Rp5.121.658.105,00	51,22%
Belanja Transfer	Rp423.664.111.591,00	Rp406.454.081.063,00	95,94%
Belanja Bagi Hasil	Rp12.486.963.799,00	Rp11.909.878.616,00	95,38%
Belanja Bantuan Keuangan	Rp411.177.147.792,00	Rp394.544.202.447,00	95,95%
Surplus / (Defisit)	-Rp615.630.116.039,00	Rp196.655.113.351,60	-31,94%
Pembiayaan Daerah			
Penerimaan Pembiayaan	Rp649.472.765.324,00	Rp649.472.765.324,64	100,00%

Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan	Target	Realisasi	Realisasi (%)
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Rp649.472.765.324,00	Rp649.472.765.324,64	100,00%
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	Rp0,00	Rp0,00	0,00%
Pengeluaran Pembiayaan	Rp3.405.350.435,00	Rp0,00	0,00%
Penyertaan Modal Daerah	Rp3.405.350.435,00	Rp0,00	0,00%
Pembiayaan Netto	Rp646.067.414.889,00	Rp649.472.765.324,64	100,53%
	Rp0,00	Rp846.127.878.676,24	100,00%

Sumber : BPKPAD Kab.Banjara

5. INOVASI DAERAH

6. Berdasarkan Database Inovasi Daerah Kabupaten Banjara memiliki inovasi daerah sebanyak 49 Inovasi, sebagai berikut:

No	Pelaksanaan Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	Geolasting (Geospasial untuk Kolaborasi Atasi Stunting)	Sebuah strategi terintegrasi yang memadukan pemanfaatan teknologi geospasial untuk mengidentifikasi wilayah prioritas, memperkuat kolaborasi lintas sector, serta memantau capaian secara real-time
2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	SI-ANIDA (Suara Inspirasi Anak Inovasi Daerah)	Berupa platform atau sistem komunikasi yang dirancang untuk mempercepat, memperluas, dan mempermudah penyebaran (diseminasi) hasil riset dan inovasi lokal. SI-ANIDA berfungsi sebagai wadah publikasi, kolaborasi, serta pertukaran informasi antara pemerintah daerah, peneliti, masyarakat, dan pelaku inovasi sehingga pemanfaatan hasil riset dapat lebih optimal dalam pembangunan daerah.
3	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	BSI (Bappedalitbang Sapa Inovator)	BSI merupakan forum diskusi daring yang dilaksanakan secara berkala melalui Zoom Meeting, yang menjadi ruang berbagi pengalaman, tantangan, dan praktik baik antar inovator lintas sector
4	Badan Kesatuan Bangsa Politik	Fasilitasi pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika Melalui Peraturan Bupati	Inovasi berupa Kebijakan daerah yang bertujuan memperkuat, memperjelas, dan mempercepat implementasi upaya pencegahan serta pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dengan menetapkan aturan teknis yang lebih operasional, terukur, dan mudah dilaksanakan di tingkat perangkat daerah maupun masyarakat
5	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	PENJAWAB JITU ONLINE (Pelayanan Tanya Jawab Bidang Perizinan Tertentu Online)	Penjawab Jitu Online merupakan inovasi layanan konsultasi perizinan berbasis WhatsApp dan Zoom yang terintegrasi, dirancang untuk mempercepat, mempermudah, dan memperluas akses masyarakat dalam memperoleh informasi serta pendampingan terkait perizinan tertentu secara responsif, efisien, dan real-time
6	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah	GEOTAX BANJAR (Transformasi Penetapan NPOP BPHTB Berbasis Geotagging Peta Zona Nilai Tanah di Kabupaten Banjara)	GEOTAX BANJAR adalah inovasi penetapan NPOP BPHTB yang memanfaatkan teknologi geotagging dan peta zona nilai tanah untuk memastikan proses penilaian objek pajak menjadi lebih akurat, transparan, cepat, dan berbasis data spasial di Kabupaten Banjara
7	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	LAPAT MANIS (Layanan Cepat Tanggap Masyarakat Berkebutuhan Khusus)	Layanan cepat tanggap yang ditujukan bagi masyarakat berkebutuhan khusus untuk memastikan mereka mendapatkan bantuan, pendampingan, dan respons pelayanan publik secara lebih cepat, tepat, dan inklusif.
8	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	PELUKIS DESA (Pelayanan KIA Di Sekolah Untuk Tingkat Dasar Dan Desa)	Pelayanan KIA yang dilaksanakan di sekolah tingkat dasar dan desa untuk mempermudah akses layanan kesehatan ibu dan anak secara lebih dekat, cepat, dan terjadwal bagi masyarakat.
9	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	DESAKU PELANDUK MANIS (Pelayanan Adminduk ada di Desa)	Pelayanan administrasi kependudukan yang menghadirkan layanan adminduk langsung di desa, sehingga masyarakat dapat mengurus dokumen kependudukan dengan lebih mudah, cepat, dan dekat tanpa harus ke kantor dinas
10	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	SIGAP DOKKAR (Menerbitkan langsung dokumen kependudukan warga terdampak musibah)	Layanan cepat dari pemerintah daerah untuk menerbitkan kembali dokumen kependudukan—seperti KTP, KK, atau akta—bagi warga yang kehilangan dokumen akibat musibah kebakaran. Layanan ini dilakukan secara proaktif di lokasi kejadian sehingga korban dapat segera mendapatkan dokumen pengganti tanpa harus melalui proses administrasi yang panjang.

No	Pelaksanaan Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
		kebakaran)	
11	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	SAPPA BANJAR (Sosialisasi, Edukasi, dan Peningkatan Pemahaman Adminduk Warga Banjar)	Layanan yang bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang administrasi kependudukan melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi yang terstruktur. Program ini membantu warga lebih mudah memahami prosedur, manfaat, dan pentingnya dokumen kependudukan sehingga kepatuhan dan kualitas layanan adminduk di Kabupaten Banjar semakin meningkat.
12	RSUD Ratu Zalecha	SIMUTU RAZA (Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit Ratu Zalecha)	SIMUTU RAZA merupakan inovasi digital yang dikembangkan oleh Rumah Sakit Ratu Zalecha sebagai sistem informasi terintegrasi untuk mendukung pengelolaan manajemen rumah sakit secara efektif, efisien, dan akuntabel. Inovasi ini dirancang untuk mengintegrasikan berbagai layanan dan proses administrasi rumah sakit, mulai dari pelayanan pasien, rekam medis, keuangan, hingga pelaporan manajemen, dalam satu sistem berbasis teknologi informasi.
13	RSUD Ratu Zalecha	SI IMUT-SIMRS (Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit)	Sistem digital yang terintegrasi untuk mendukung pengelolaan mutu layanan di rumah sakit, mulai dari pencatatan data pasien, proses pelayanan, hingga pemantauan indikator mutu. Sistem ini membantu rumah sakit bekerja lebih efisien, akurat, dan transparan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.
14	RSUD Ratu Zalecha	KOMEN SEHAT (Konsultasi Online Masyarakat Melalui Telemedisin, Sistem Efektif Hubungan Antar Tenaga Medis)	Layanan kesehatan berbasis telemedisin yang memungkinkan masyarakat mendapatkan konsultasi medis secara online. Program ini juga memperkuat koordinasi antar tenaga medis sehingga pelayanan kesehatan menjadi lebih cepat, efektif, dan mudah diakses tanpa harus datang langsung ke fasilitas kesehatan
15	RSUD Ratu Zalecha	RAJA SORAZA (Rawat Jalan Sore RSUD Ratu Zalecha)	RAJA SORAZA (Rawat Jalan Sore RSUD Ratu Zalecha) merupakan inovasi pelayanan publik di Poliklinik Rehabilitasi Medik yang dikembangkan untuk mengatasi penumpukan pasien dan lamanya waktu tunggu pada layanan rawat jalan pagi. Melalui inovasi ini, rumah sakit membuka layanan rawat jalan pada sore hari pukul 14.00–16.30 WITA, dengan pendaftaran yang dapat dilakukan secara online maupun onsite serta tetap terhubung dengan sistem BPJS..
16	RSUD Ratu Zalecha	SIPANGGAR (Sistem Informasi Perencanaan Dan Penganggaran BLUD) Rumah Sakit	SIPANGGAR merupakan sebuah inovasi Proses Administrasi/Manajerial yang menitikberatkan dengan memberikan kemudahan pada penyelesaian pekerjaan (Perencanaan dan penganggaran BLUD rumah sakit) berbasis digital.
17	RSUD Ratu Zalecha	LAKASI RAZA (Layanan Penanganan Kusta Terintegrasi RSUD Ratu Zalecha)	Inovasi digital di bidang pelayanan publik yang bertujuan untuk mempercepat pencapaian target eliminasi kusta di Kabupaten Banjar melalui telemedicine dan mapping, yang memungkinkan konsultasi online antara tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan primer dengan dokter spesialis kulit dan kelamin di RSUD Ratu Zalecha serta pengumpulan data epidemiologis untuk pemetaan wilayah dengan prevalensi kusta tinggi.
18	Dinas Pendidikan	TUNTAS BANJAR (Strategi Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) Terintegrasi di Kabupaten Banjar	TUNTAS BANJAR (Strategi Penanganan Anak Tidak Sekolah Terintegrasi) merupakan inovasi Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar yang bertujuan menangani permasalahan Anak Tidak Sekolah (ATS) secara komprehensif, terstruktur, dan lintas sektor. Inovasi ini mengintegrasikan proses pendataan, verifikasi, pendampingan, dan intervensi ATS melalui kolaborasi antara Dinas Pendidikan, perangkat daerah terkait, satuan pendidikan, pemerintah desa, serta lembaga pendidikan nonformal. TUNTAS BANJAR menitikberatkan pada pemanfaatan data yang akurat sebagai dasar penentuan kebijakan dan intervensi agar anak dapat kembali mengakses layanan pendidikan sesuai kebutuhannya .
19	Dinas Pendidikan	SI CERAH (Siap Cepat Ramah)	Aplikasi digital dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar yang dirancang untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan pada sektor PAUD dan Pendidikan Nonformal melalui pengelolaan data, layanan, dan informasi yang lebih cepat, akurat, dan ramah pengguna.
20	Satuan Polisi Pamong Praja	PROMED (Program Mediasi)	Program Mediasi (PROMED) merupakan inovasi non-digital Satpol PP Kabupaten Banjar untuk mengatasi kendala penyelesaian pelanggaran Peraturan Daerah yang selama ini harus melalui proses persidangan (yustisi) dengan biaya tinggi dan waktu yang lama. Melalui mekanisme mediasi, Satpol PP dapat menyelesaikan kasus pelanggaran Perda atau Perkada secara lebih cepat, efisien, dan tanpa beban anggaran besar, terutama karena masih terbatasnya kompetensi PPNS dan anggaran persidangan. Inovasi ini memberikan manfaat berupa percepatan penyelesaian kasus, penghematan anggaran, peningkatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta mempermudah masyarakat dalam mendapatkan penyelesaian sengketa secara lebih manusiawi dan efektif.
21	Satuan Polisi Pamong Praja	APLIKASI SIAP (Sistem Informasi Aduan Dan Pelayanan)	Sistem Informasi Aduan dan Pelayanan (SIAP) adalah inovasi digital yang dikembangkan untuk mempercepat proses penanganan aduan masyarakat terkait pelanggaran Perda/Perkada. Sebelumnya, aduan melalui SP4N

No	Pelaksanaan Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
			LAPOR dan media sosial membutuhkan proses panjang sehingga menghambat tindak lanjut di lapangan. Dengan SIAP, aduan dapat diterima, diproses, dan ditindaklanjuti secara cepat dan terstruktur melalui panduan SOP dan sistem online yang mudah diakses. Inovasi ini meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat respons Satpol PP, mendukung ketertiban umum, serta memudahkan masyarakat dalam menyampaikan aduan dan memantau tindak lanjutnya.
22	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	PROTEKSI BANJAR (Program Terpadu Kolaborasi Sistem Informasi Pemadam Banjar)	PROTEKSI BANJAR menekankan pada pendekatan preventif, responsif, dan solutif. Pendekatan preventif dilakukan melalui deteksi dini dan penguatan peran lingkungan sosial, responsif melalui penanganan cepat terhadap laporan atau temuan permasalahan sosial, serta solutif melalui pemberian layanan lanjutan sesuai kebutuhan masyarakat, baik berupa pendampingan sosial, rujukan layanan, maupun fasilitas bantuan yang relevan.
23	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	PENGEMBANGAN APLIKASI SI DAMKAR (Sistem Informasi Manajemen Data Pemadam Kebakaran Kabupaten Banjar)	Aplikasi digital yang dikembangkan untuk mengelola data operasional pemadam kebakaran secara lebih cepat, akurat, dan terintegrasi sehingga mendukung respons penanganan kebakaran yang lebih efektif di Kabupaten Banjar.
24	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	APAR BAMARA (Aksi Pencegahan Aktif Responsif Berdayakan Masyarakat Antisipasi Kebakaran)	Program pemberdayaan masyarakat yang berfokus pada edukasi, pelatihan, dan tindakan preventif untuk meningkatkan kesiapsiagaan warga dalam mencegah dan merespons kebakaran secara cepat dan mandiri.
25	Dinas Pertanian	BATURAI INTAN (Banjar Tumbuhkan Santri Tani Milenial Inovatif Tangguh Dan Andal)	BATURAI INTAN merupakan inovasi Dinas Pertanian Kabupaten Banjar yang dikembangkan dari inovasi Batumbang Tani sebagai upaya memperkuat regenerasi petani melalui pelibatan santri di pesantren sebagai calon petani milenial. Inovasi ini hadir untuk menjawab tantangan rendahnya minat generasi muda dan semakin menurunnya produktivitas akibat bertambahnya usia petani. Melalui pelatihan terpadu, praktik di lahan pesantren, serta pembinaan berkelanjutan, program ini bertujuan menumbuhkan minat, kompetensi, dan kemandirian santri dalam sektor pertanian agar mampu menjadi petani muda yang inovatif, tangguh, dan adaptif terhadap teknologi.
26	Dinas Pertanian	BAHUMA CANGKAL (Batanam Banih Hemat Dan Ramah Lingkungan Memakai Cangkang Telur Dan Mulsa Kayapu)	BAHUMA CANGKAL adalah inovasi pertanian dari BPP Gambut yang memanfaatkan cangkang telur dan mulsa kayapu sebagai pupuk organik ramah lingkungan dan berbiaya rendah. Inovasi ini lahir dari kebutuhan petani akan pupuk yang murah, mudah diperoleh, serta mampu mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia yang harganya semakin mahal. Melalui pemanfaatan cangkang telur yang kaya kalsium dan unsur hara penting lainnya, petani dapat meningkatkan kesuburan tanah, mencegah penyakit tanaman, serta meningkatkan hasil panen tanpa merusak lingkungan.
27	Dinas Pertanian	TERONG BANGTANI (Terus Dorong Kembangkan Petani)	TERONG BANGTANI (Terus Dorong Kembangkan Petani) merupakan inovasi yang bertujuan mengaktifkan kembali kelompok tani di Kecamatan Karang Intan, memperkuat penerapan teknologi pertanian modern, serta mendorong optimalisasi pemanfaatan 20% Dana Desa untuk ketahanan pangan. Inovasi ini lahir dari kondisi hanya 25% kelompok tani yang aktif, lambatnya adopsi teknologi budidaya, serta rendahnya komitmen desa dalam mengalokasikan anggaran pertanian. Melalui peran aktif Penyuluh Pertanian Lapangan dan Penyuluh Pertanian Swadaya, inovasi ini menggerakkan desa untuk membuat demplot padi unggul dengan sistem Jajar Legowo, menjadikan Desa Lihung dan Pasar Lama sebagai desa percontohan, serta memperluas usaha pertanian dan peternakan di seluruh desa binaan.
28	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	SI PRASWITA (Sistem Informasi Prasarana Dan Sarana Pariwisata)	Sistem digital yang digunakan untuk menghimpun, mengelola, dan menyajikan data sarana serta prasarana pariwisata secara terintegrasi, sehingga mendukung perencanaan, pelayanan, dan pengembangan sektor pariwisata secara lebih efektif dan akurat.
29	Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian Dan Perdagangan	KEDAI KOPI (Kanal Edukasi Dan Informasi Koperasi)	Media informasi yang menyediakan edukasi, sosialisasi, dan publikasi terkait perkoperasian, sehingga membantu meningkatkan pemahaman, kapasitas, dan keterlibatan masyarakat serta pelaku koperasi secara lebih mudah dan terarah.
30	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	INTAN SIKAPAYU (Inovasi Tangguh Sinergi Kampung Ikan Papuyu)	Inovasi pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal melalui pengembangan terintegrasi kampung budidaya ikan papuyu, yang melibatkan sinergi masyarakat, pemerintah, dan pelaku usaha untuk meningkatkan produksi, nilai tambah, dan kesejahteraan warga
31	UPT Balai Benih Dan Induk Ikan Karang Intan	IKAN TAUMAN (Intensifikasi Lahan Tadah Hujan Dan Musiman)	Pemanfaatan lahan tadah hujan secara optimal untuk kegiatan budidaya ikan pada musim-musim tertentu, sehingga meningkatkan produktivitas perikanan dan memberikan nilai ekonomi tambahan bagi masyarakat

No	Pelaksanaan Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
32	UPT Balai Benih Dan Induk Ikan Karang Intan	BABARI KOLAM (Berlimpah Benih Ikan Dengan Kolaborasi Multi Pihak)	Kolaboratif yang melibatkan berbagai pihak untuk meningkatkan ketersediaan dan produksi benih ikan secara berkelanjutan, sehingga mendukung penguatan sektor perikanan dan kesejahteraan masyarakat.
33	UPT Balai Benih Dan Induk Ikan Karang Intan	SI LELGA PAHAM (Antisipasi Ilegal Fishing Dengan Budidaya Papuyu Haruan Alam)	Inovasi yang bertujuan mengurangi praktik penangkapan ikan ilegal dengan mendorong masyarakat beralih kepada budidaya ikan papuyu dan haruan secara alami, sehingga menjaga kelestarian sumber daya perikanan sekaligus meningkatkan ekonomi lokal.
34	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	ASDETA (Aset Desa Kita)	Sistem pengelolaan aset desa yang bertujuan meningkatkan pendataan, pemanfaatan, dan pengawasan aset desa secara lebih akurat, transparan, dan tertib untuk mendukung tata kelola pemerintahan desa yang efektif.
35	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Peraturan Bupati Banjar Tentang Tata Kerja Sama Desa Dalam Mengoptimalkan Pengembangan Ekonomi Perdesaan Melalui Kerja Sama Desa	Penyusunan Peraturan Bupati untuk mengatur kerja sama desa dalam pengembangan ekonomi perdesaan, mengatasi kendala koordinasi dan sumberdaya. Aturan ini mendorong Kerjasama antar desa, sector swasta, dan BUM Desa untuk pengelolaan yang lebih efektif dan berkelanjutan
36	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	OPAL PPKS SI PROSEDUR DIGITAL (Standarisasi Prosedur Dan Digitalisasi Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial)	Peningkatan layanan kesejahteraan sosial melalui penyederhanaan, penyeragaman (standardisasi), dan digitalisasi prosedur layanan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Inovasi ini bertujuan agar proses pelayanan menjadi lebih cepat, akurat, transparan, dan mudah diakses, baik oleh petugas maupun PPKS.
37	Kecamatan Gambut	SIP RAM (Sistem Informasi Dokumen Perencanaan Dan Program Kegiatan)	Sistem digital yang digunakan untuk mengelola, menyimpan, dan memudahkan akses terhadap dokumen perencanaan serta program kegiatan kecamatan secara lebih terstruktur, cepat, dan transparan
38	Kecamatan Karang Intan	SIPELARI-RIB (Rumah Informasi Bersama)	pusat layanan informasi terpadu yang menyediakan berbagai data, edukasi, dan layanan publik dalam satu tempat sehingga memudahkan masyarakat mengakses informasi secara cepat, akurat, dan terkoordinasi.
39	Kecamatan Simpang Empat	PROGRAM SADAR ADMINISTRASI (Satu Data Rekap)	SADAR ADMINISTRASI merupakan sebuah sistem yang dibangun dengan memanfaatkan teknologi informasi google drive guna menghimpun data pemerintah Kecamatan Simpang Empat secara elektronik.
40	Kecamatan Sambung Makmur	SILAKIMETAL (Efisiensi Pelaporan Kinerja ASN Melalui Media Digital)	SILAKIMETAL (Efisiensi Pelaporan Kinerja ASN Melalui Media Digital) merupakan inovasi tata kelola administrasi yang dikembangkan oleh Kecamatan Sambung Makmur untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaporan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN). Inovasi ini memanfaatkan media digital (Google Sheet/drive kecamatan) sebagai sarana pengumpulan, pemantauan, dan evaluasi laporan kinerja ASN
41	Kecamatan Mataraman	PERSADA MANIS (Pojok Ekonomi Kreatif Bersama Desa Maju, Mandiri, Agamis)	Pemberdayaan ekonomi desa melalui ruang atau wadah kreatif yang mendorong munculnya produk, usaha, dan kegiatan ekonomi lokal secara kolaboratif untuk mendukung kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa
42	UPTD Puskesmas Telaga Bauntung	BAKUL KADER (Belajar Dan Kuliah Bersama Kader)	Program peningkatan kapasitas kader melalui kegiatan belajar dan pelatihan bersama secara terstruktur, sehingga kader memiliki pengetahuan dan keterampilan yang lebih baik dalam mendukung pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
43	UPTD Puskesmas Telaga Bauntung	KURMA KUNING RASA PERMEN (Kunjungan Rumah Untuk Skrining PTM)	Inovasi layanan kesehatan berbasis kunjungan rumah yang bertujuan melakukan skrining penyakit tidak menular (PTM) secara langsung kepada masyarakat, sehingga deteksi dini dapat dilakukan lebih cepat, mudah, dan efektif.
44	UPTD Puskesmas Telaga Bauntung	KEPITING (Kelompok Peduli Stunting))	Inovasi gerakan masyarakat berupa kelompok yang fokus pada pencegahan dan penanganan stunting melalui edukasi, pemantauan tumbuh kembang, serta dukungan gizi dan kesehatan bagi anak dan keluarga.
45	UPTD Puskesmas Telaga Bauntung	GINTAS (Gerakan Iva Test Keliling Desa)	Inovasi layanan kesehatan keliling yang menyediakan pemeriksaan IVA (Inspeksi Visual dengan Asam Asetat) langsung ke desa-desa untuk deteksi dini kanker serviks, sehingga meningkatkan akses, partisipasi, dan kesadaran perempuan terhadap pemeriksaan rutin.
46	UPTD Puskesmas Telaga Bauntung	KALIBER HT (Kartu Kendali Berobat Hipertensi)	Inovasi alat pemantauan sederhana dalam bentuk kartu yang membantu pasien hipertensi mencatat, mengontrol, dan menindaklanjuti pengobatan secara lebih teratur dan terpantau oleh tenaga kesehatan.
47	UPTD Puskesmas Astambul	KU PENGEN CERIMA (Kuis Pengetahuan Cegah Pernikahan Dini Pada Remaja)	Inovasi edukatif berbentuk kuis interaktif yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran remaja tentang risiko dan dampak pernikahan dini, sehingga mendorong mereka membuat keputusan yang lebih sehat dan bertanggung jawab.
48	UPTD Puskesmas Martapura Barat	GIAT SI APING (Gigi Sehat Aksi Pencegahan Stunting)	Program kesehatan yang berfokus pada peningkatan kesehatan gigi dan mulut sebagai upaya penting dalam pencegahan stunting, melalui edukasi, pemeriksaan, dan tindakan promotif-preventif bagi anak dan masyarakat.

No	Pelaksanaan Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
49	UPTD Puskesmas Sungai Tabuk 2	KUCING BAGASING (Konsumsi Obat Cacing Untuk Pencegahan Stunting)	Inovasi program kesehatan yang mendorong pemberian obat cacing secara rutin kepada anak sebagai langkah preventif untuk mencegah infeksi cacing, sehingga membantu meningkatkan penyerapan nutrisi dan menurunkan risiko stunting.

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Bupati Banjar,



H. SAIDI MANSYUR, S.I.Kom

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.

